

OBJEKTIVIKASI PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL WARGA NEGARA DEMOKRATIS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Samsuri¹

Abstract

This paper traces the main problems of civic education in the Soeharto and Post-Soeharto periods. Academically, the focus on "Pancasila" (Indonesia's National Philosophy) in civic education in the past was often criticized as means of indoctrination. As a result, civic education could not function properly in the attempt to build good citizens. However, this paper suggests that the new civic education focusing on democratic values developed in the era of Reformasi offers opportunities to build social capital and intellectual capital.

Kata Kunci : *civic education, objektivikasi Pancasila, social capital, intellectual capital*

Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia selama lebih dari 30 tahun terutama pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi rejim. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan moral yang diharapkan. Di sisi lain, ukuran keutamaan tindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan moral yang diekspresikan individu lebih bersifat heteronom.

PKn dalam model persekolahan (*schooling model*) pun terdapat kesenjangan antara laporan prestasi belajar mata pelajaran PKn yang menekankan aspek moralitas warga negara dengan perilaku/tindakan

¹ Samsuri adalah Dosen pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. E-mail: samsuri@uny.ac.id.

moral yang diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya, jika siswa mendapat penilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinya perilaku moral kewargaan yang diekspresikannya adalah cerminan "nilai hasil ujian" yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari "hasil ujian" berarti bahwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian PKn yang menekankan moralitas dan relatif mengutamakan aspek kognitif tersebut kurang memadai.

Pada bagian lain, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Kurikulum 2004 (biasa disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moral Pancasila. Sebelum KBK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilai-nilai moral Pancasila, yang sebenarnya lebih merupakan pendidikan budi pekerti daripada pendidikan kewarganegaraan yang sesungguhnya. Implikasi PKn yang identik dengan pendidikan budi pekerti ialah cakupan kajian dan kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan dari PKn itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*) dalam warga negara demokratis yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sistem politik negaranya, direduksi hanya menjadi semata-mata menghapalkan bagaimana harus berbuat baik dan tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-moral secara formal.

Di sisi lain, iklim demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia pasca 1998 tidak lagi diwarnai oleh kerasnya pergumulan (konflik) ideologis untuk membela ataupun menolak Pancasila sebagai dasar negara. Pembicaraan Pancasila sebagai dasar negara seolah sudah selesai bagi setiap elemen masyarakat, setelah di masa Orde Baru pernah di sebagian masyarakat terjadi penolakan secara keras terhadap pemberlakuan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Krisis ekonomi dan politik sejak 1997 hingga kemudian bergulir gelombang reformasi pada 1998 menumbuhkan pertanyaan tentang di mana dan bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi dapat menjawab krisis bangsa. Ini seakan-akan sekaligus mempertanyakan keabsahan Pancasila sebagai suatu "mukjizat" bagi bangsa untuk menjawab apa saja yang dikehendaki sistem berbangsa yang sedang terpuruk. Pancasila seolah-olah tumpul, tidak memiliki "keramat" sebagaimana dipuja-puja oleh sistem kekuasaan baik semasa rejim Sukarno maupun rejim Soeharto.

Pancasila yang selama rejim Suharto berkuasa selalu menjadi pemanis pidato-pidato, ceramah-ceramah, materi cerdas-cermat, lomba-lomba, kidung *macapat*, lagu kasidah, bahkan untuk penataran di sarang-

sarang pelacuran. Setelah runtuh rejim tersebut seolah Pancasila menjadi "impoten," tidak memiliki keperkasaan, tidak memiliki "karomah" (kemulyaan), dipinggirkan dan disingkirkan dalam komunikasi bangsa sehari-hari. Tragis. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak ingat lagi dengan jargon-jargon yang populer di era penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pancasila tampak sebagai "cagar budaya" dalam museum sejarah bangsa Indonesia.

Dari perspektif pendidikan nasional, derita paling menyakitkan adalah stigma yang dilekatkan kepada mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), termasuk pula kepada institusi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bernama IKIP (STKIP atau FKIP Universitas) yang di dalamnya terdapat Jurusan/Program Studi PPKn. Stigma negatif diarahkan kepada matapelajaran dan jurusan ini karena tidak berhasil menanamkan moral Pancasila, dengan makin maraknya korupsi dan krisis moral para pejabat serta politisi. Ini selain tidak adil juga terkesan bahwa tanggung jawab mendidik moral bangsa dibebankan hanya kepada lembaga ini. Padahal, pendidikan sebagai tanggung jawab negara sejak Indonesia merdeka selalu mengalami marjinalisasi dalam *policy* nasional seperti anggaran belanja negara (APBN). Sementara itu, PPKn sendiri meski katanya menjadi mata kajian penting seperti disebut dalam bagian UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru, namun nasibnya sekadar alat pembangunan.

Apa yang salah dengan Pancasila sehingga mengalami nasib tragis (terpuruk) dalam peri kehidupan nasional Indonesia sekarang ini? Apakah memang Pancasila sudah betul-betul mengalami "kematian" sebagai ideologi bangsa, sehingga ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Lalu, bagaimana Pancasila dapat menjadi spirit nasional dalam kerangka pembentukan modal sosial warga negara demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan?

Pancasila dalam Politik Pendidikan Nasional

Peran negara menafsirkan ideologi nasional melalui arena pendidikan tidak hanya dilakukan rejim Orde Baru. Sebelumnya, di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul "CIVICS MANUSIA INDONESIA BARU," karangan Mr. Soepardo, dkk. Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat